

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kampung Kota

Kampung merupakan salah satu bentuk dari permukiman kota. Pengertian kampung dalam kamus tata ruang (Soefaat et al, 1997) adalah kelompok perumahan dari bagian kota yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, perumahan yang dibangun secara tidak formal, kurang sarana dan prasarana, dihuni sangat padat dan cenderung semakin padat, sehingga kesehatan merupakan masalah utama. Kampung merupakan tipikal pemukiman dengan kepadatan tinggi yang banyak dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah, terbentuk tanpa melalui perencanaan, serta infrastruktur yang cenderung kurang memadai (Silas, 2012). Oleh karena itu kampung sering diasosiasikan dengan kemiskinan dan buruknya kualitas hidup penduduk kota. Kampung kota memiliki berbagai masalah seperti kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, serta kurangnya sarana pelayanan dasar seperti air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuatan sampah dan lainnya (Suryandari, 2004).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kampung kota adalah suatu kawasan permukiman di dalam kota yang terbentuk tanpa perencanaan, kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, kurangnya ketersediaan sarana prasarana, serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

2.2 Tinjauan Tentang Ruang

2.2.1 Ruang Kampung

Ruang dalam arsitektur kota lebih ditunjukkan pada ruang yang terbentuk oleh sekelompok bangunan, tata vegetasi, jalan, dan unsur alam (pohon, tebing, sungai, dan lainnya). Pada dasarnya ruang kota dibedakan oleh karakteristik yang menonjol seperti kualitas yang melingkupinya, kualitas pengolahan detail, dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya (Triarso, 2005).

Menurut Putera (2014) tatanan fisik spasial kampung kota terbentuk secara alamiah. Pembentukan ruang-ruang di kampung-kampung tidak pernah berlangsung secara formal dan *by design*. Ruang-ruang pada kampung kota terbentuk secara informal dan alamiah sesuai kebutuhan yang muncul saat itu. Ruang tersebut dapat berupa sudut jalan, ruang antara rumah, sumur tempat mencuci warga, dan lainnya (Sunaryo et al, 2010).

Munculnya perumahan pada kampung kota juga dilakukan secara bertahap tanpa direncanakan. Pertumbuhan alamiah ini dapat terlihat pada jaringan jalan yang terbentuk di dalamnya. Jalan pada kampung kota terbentuk mengikuti pola kavling bangunan rumah. Penggunaan jalan di kampung kota bukan hanya dimanfaatkan sebagai ruang untuk sirkulasi semata, namun sering dijumpai, beragam aktivitas masyarakat yang menggunakan ruang jalan (Putera, 2014).

Ruang publik di kampung kota secara fisik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingkat kepadatan penghuni, lingkungan yang umumnya tumbuh tanpa terencana, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, sumber daya terbatas, serta belum tertatanya lahan yang ada untuk ruang publik. Namun masyarakat kampung kota dapat meniasati ruang dan pola penggunaannya sehingga aktivitas bersama masih tetap dapat dilakukan (Widaningsih et al, 2007). Sebagai pemenuhan dari kebutuhan aktivitas sosial, sebagian warga membentuk ruang-ruang publik informal dan spontan yang terbentuk dari konsepsi ruang di kampung-kampung kota (Sunaryo et al, 2010).

2.2.2 Ruang Komunal

Suparlan (1984) menyebutkan bahwa tindakan pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilihat sebagai tindakan-tindakan secara pribadi dan secara sosial. Tindakan tersebut dapat menciptakan ruang-ruang yang dipergunakan untuk melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan manusia menjadi dua yaitu sebagai ruang pribadi dan ruang sosial. Ruang sosial merupakan ruang yang terbentuk karena adanya aktivitas bermasyarakat (Indeswari et al, 2013). Ruang sosial yang berfungsi untuk kegiatan sosial dan digunakan untuk seluruh masyarakat dapat disebut sebagai ruang komunal. Ruang komunal berasal dari kata *communal space* yaitu *communal* yang berarti masyarakat atau umum dan *space* yang berarti ruang. Ruang komunal juga banyak diartikan sebagai *common space* atau ruang bersama (Anwar, 1998).

Menurut Widiastuti et al (2013) ruang komunal merupakan ruang yang mewadahi aktivitas bersama yang menampung kegiatan sosial untuk seluruh masyarakat atau komunitas tertentu. Ruang komunal juga dapat diartikan sebagai ruang untuk berbagi bersama yang digunakan sebagai interaksi antara anggota suatu komunal, dimana dapat menimbulkan kebersamaan atau keguyuban (Rapoport, 1982). Ruang komunal menjadi wadah yang menampung berbagai kegiatan kebersamaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya (Darmiwati, 2000).

Menurut Winarni et al (2013) ruang komunal adalah ruang bersama yang dibatasi dengan elemen fisik maupun non fisik yang didalamnya menampung kegiatan sosial

dengan pelaku utama komunitas masyarakat. Ruang komunal berada di lingkungan perumahan yang didesain, dikembangkan dan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat (Darmawan, 2009). Ruang komunal erat kaitannya dengan masyarakat di suatu tempat yang mungkin memiliki latar belakang dan budaya sama dengan menganut suatu norma sosial sehingga dalam penggunaan ruang semua mematuhi norma sosial yang telah disepakati (Firmandhani et al, 2013).

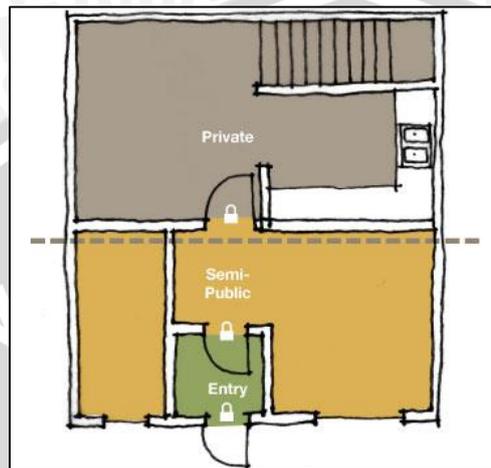
Ruang komunal merupakan jenis ruang yang selalu ada pada masyarakat Indonesia (Indeswari et al, 2013). Hal tersebut menjadi simbol dari masyarakat permukiman yang menunjukkan hubungan baik antar sesama ditandai dengan kebersamaan dan keguyuban. Di Nusantara telah dikenal ruang-ruang bersama seperti Tenean di Madura, natar di Flores, dan natah di Bali, sedangkan pada masa kini gang kampung adalah jalan sekaligus ruang bersama (Priyotomo dan Pangarsa, 2010). Pada kampung kota sering dijumpai dilakukannya aktivitas pada ruang jalan. Keberadaan ruang jalan memberikan pemahaman bahwa ruang jalan pada kampung kota dapat dipahami sebagai ruang sosial (Putera, 2014).

Menurut Najib et al (2013) ruang komunal pada masa kini bukan merupakan ruang yang bersifat tetap, ruang komunal memiliki sifat kesementaraan dan kesejenakan. Ruang komunal berfungsi sebagai ruang tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, tempat bermain anak, dan tempat untuk melakukan aktivitas publik lainnya. Ruang komunal dapat terbentuk dengan perancangan secara khusus dan terbentuk dengan sendirinya. Ruang komunal tersebut dapat berada di ruang publik yang mudah diakses dan dapat pula berada di ruang privat yang dimanfaatkan bersama (Ardianti, 2014). Menurut Santoso (2009) ruang komunal merupakan ruang yang mudah diakses dan digunakan warga dalam berinteraksi sosial. Ruang komunal ini dapat berupa taman, jalan umum, atrium, ruang tunggu, serta ruang umum lainnya baik *indoor* maupun *outdoor*.

Soepratikno (2004) menyebutkan bahwa ruang komunal dapat berupa ruang terbuka maupun ruang tertutup. Ruang komunal terbuka dapat berupa taman, lapangan olahraga, gang, musola, warung, dan lainnya. Ruang komunal terbuka dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk, area bermain, gardu pandang, dan elemen estetis lainnya (Darmawan, 2009). Ruang komunal di suatu lingkungan masyarakat digunakan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan baik dalam kegiatan informal ataupun formal (Purwanto et al, 2012). Kegiatan formal dapat berupa pengajian maupun pertemuan, sedangkan kegiatan informal dapat berupa mengobrol atau nongkrong (Sativa et al, 2007).

Ruang komunal tertutup berupa ruang komunal di lingkungan rumah. Lingkungan rumah juga menjadi ruang komunal dalam lingkungan permukiman (Najib, 2013). Ruang

komunal dalam rumah merupakan ruang yang memungkinkan terjadinya koneksi dengan masyarakat. Ruang komunal tersebut dapat berupa ruang tamu atau ruang keluarga. Pemanfaatan ruang-ruang tersebut bersifat terbatas untuk anggota keluarga namun dengan izin dari pemilik tamu diperbolehkan masuk. Ruang komunal dalam rumah menjadi tempat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan untuk aktivitas bersama seperti arisan, acara keluarga, atau pengajian pada waktu tertentu (Indeswari, 2013).



Gambar 2. 1 Ruang komunal didalam rumah

Sumber : Building Dignity - <http://buildingdignity.wscadv.org/communal-space/reconnect/>

Ruang komunal atau ruang bersama berbeda dengan ruang publik. Menurut Santoso (2009) ruang komunal memiliki sifat yang sama dengan ruang publik yaitu sebagai tempat melakukan interaksi namun konsep ruang komunal berbeda dengan ruang publik. Ruang publik memiliki cakupan yang lebih luas yaitu semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada pembedaan. Ruang publik diakses untuk kepentingan umum dan pelaku yang menggunakan ruang publik tidak mempunyai rasa memiliki ruang, khususnya rasa dalam memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Sedangkan ruang komunal memiliki kualitas teritorial, bukan berarti *claim* atau menguasai suatu tempat, melainkan sebagai pengelola ruang (Najib et al, 2013). Ruang komunal hanya diperuntukkan bagi suatu komunitas tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang komunal terwujud sebagai ruang yang pemanfaatannya untuk kepentingan bersama anggota pemiliknya. Ruang komunal memiliki nilai ke-kami-an (Priyotomo, 2009). Pelaku yang memakai ruang komunal mempunyai rasa memiliki ruang, rasa dalam memiliki hubungan kekeluargaan baik dalam hubungan darah (kerabat) maupun hubungan sosial sebagaimana keluarga.

2.2.3 Aktivitas Masyarakat di Ruang Kampung

Aktivitas masyarakat di kampung kota dipengaruhi oleh keterbatasan ruang kampung akibat kepadatan kota. Dalam kondisi kepadatan hunian yang tinggi dan

keterbatasan ruang, penduduk kampung dapat melakukan adaptasi dan toleransi keruangan. Kepadatan dan keterbatasan tersebut memberikan kreativitas bagi penghuninya untuk bertindak dan berperilaku. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan ada di kampung yang tidak tergunakan untuk aktivitas atau penggunaan warga kampung, lebih sering terjadi penumpukan aktivitas dalam satu ruang yang dibagi berdasar waktu (Santoso, 2006). Menurut Lang (1987) sebuah seting aktivitas memiliki beberapa unsur anatra lain:

1. Pelaku yang melakukan kegiatan
2. Aktivitas atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut
3. Tempat dimana aktivitas tersebut berlangsung
4. Waktu spesifik saat aktivitas dilakukan

Gabungan antara beberapa aktivitas yang terdiri dari suatu pola aktivitas tertentu dapat terjadi dalam sebuah seting fisik atau lingkungan. Seting fisik yang sama dapat menampung lebih dari satu seting aktivitas pada waktu yang berbeda. Suatu lingkungan mampu menampung beberapa aktivitas tanpa ada perubahan fisik lingkungan (Lang, 1987). Menurut Pramudito (2010) aktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Aktivitas yang bersifat permanen (harian)

Aktivitas yang menjadi suatu rutinitas, silih berganti antar aktivitas yang satu dengan yang lain. Aktivitas-aktivitas tersebut akan berhenti jika ada aktivitas lain, seperti aktivitas mingguan, bulanan, tahunan, atau yang bersifat *occasional*.

2. Aktivitas yang bersifat *occasional* (berkala)

Aktivitas yang berlangsung rutin namun tidak setiap hari, seperti *event* seni, pasar khusus, dan sebagainya.

2.2.4 Kualitas Ruang

Terbentuknya lingkungan permukiman dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan aktivitas dalam ruang (Rapoport, 1982).

Hak asasi permukiman merupakan pedoman pokok untuk meningkatkan kualitas permukiman. Hak asasi permukiman terbagi menjadi dua yaitu hak asasi lingkungan permukiman dan hak asasi bangunan perumahan (Budihardjo, 1997). Pedoman yang digunakan untuk mengukur kualitas ruang kampung adalah hak asasi lingkungan permukiman yang terdiri dari tujuh kriteria antara lain:

1. Fisik lingkungan harus mencerminkan pola kehidupan dan budaya warga setempat

2. Lingkungan permukiman didukung oleh fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan ukuran atau luasnya lingkungan dan banyaknya penduduk
3. Pada lingkungan permukiman berpengasilan rendah, sedapat mungkin tersedia wadah kegiatan yang dapat menambah penghasilan
4. Taman, ruang terbuka atau penghijauan harus cukup tersedia
5. Perencanaan tata letak permukiman harus memanfaatkan bentuk topografis dan karakteristik alami dari tapak setempat
6. Jalan masuk lingkungan harus berskala manusia, ada pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, serta sedapat mungkin diteduhi pohon.
7. Lingkungan permukiman harus menunjang terjadinya kontak sosial, dapat menciptakan identitas dan rasa memiliki dari penghuninya.

2.3 Tinjauan Pengelolaan Lingkungan

2.3.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah memberikan dasar bagi pengembangan permukiman yang pro-lingkungan. Salah satu dasar hukum yang merujuknya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pesan yang terkandung dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendorong permukiman untuk menyediakan sistem yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

2.3.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan

Upaya pengelolaan lingkungan hidup ialah suatu usaha melestarikan lingkungan hidup. Menurut Kuswanto (2010) bentuk upaya pengelolaan lingkungan terdiri dari:

1. Memulihkan
Memperbaiki apa yang telah terlanjur terjadi pada masa lalu serta mencegah agar kondisi lingkungan tidak menjadi lebih buruk lagi dan menjadikan suatu keadaan kembali baik seperti semula.
2. Memelihara dan memanfaatkan
Menjadikan apa yang ada sekarang menjadi berkelanjutan dengan menyelamatkan, melindungi dan merawat.

3. Mengawasi dan mengendalikan

Mengarahkan, mengontrol ataupun membatasi segala sesuatu yang berkepentingan untuk masa depan.

Soerjani et al (1987) menyatakan bahwa ada tiga upaya yang harus dijalankan secara seimbang dalam pengelolaan lingkungan, yaitu upaya teknologi, upaya tingkah laku atau sikap dan upaya untuk memahami dan menerima koreksi alami yang terjadi karena dampak interaksi manusia dengan lingkungannya.

A. Upaya Teknologi

Menurut Miarso (2007), teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Teknologi dapat juga dijadikan alat yang akan membantu proses pemeliharaan lingkungan hidup dan membantu lingkungan tetap lestari dan hijau. Pendekatan teknologi dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan akibat pembangunan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi di daerah yaitu sumber daya manusia serta sarana prasarana yang didukung pemerintah melalui model kemitraan. Upaya teknologi adalah usaha untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengakumulasi pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, mengintegrasikan, dan menciptakan teknologi baru (Widodo, 2004). Beberapa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal antara lain:

1. Teknologi pemanfaatan sampah dengan pembuatan kompos atau daur ulang kertas.
2. Metode pembuangan sampah dengan membuat tempat pembuangan sampah secara terbuka dan penimbunan bersaniter.
3. Teknologi penanganan limbah padat dengan teknologi pengkomposan (Bio Kompos), teknologi *zero waste*, dan teknologi *incenerator*.
4. Teknologi penanganan limbah cair dengan proses primer berupa penyaringan, proses sekunder berupa proses biologi dan sedimentasi, revegetasi, dan teknologi *biofilter anaerob-aerob*.
5. Pengelolaan limbah B3 dengan pengurangan dan perubahan limbah.
6. Teknologi pengendalian pencemaran udara dengan teknologi *catalytic converter*, pengendalian *blow by gas*, dan pengendalian penguapan bahan bakar.
7. Sumur resapan dan biopori
8. Pengembangan energi alternatif dengan pembangkit listrik tenaga air, tenaga ombak, tenaga panas matahari, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga nuklir, biofuel, gasohol, tenaga sampah, dan teknologi pengukur polusi udara.

9. Teknologi pencegah erosi dengan pembuatan drainase dan teknologi pengolahan tanah sesuai topografi (terasering, rorak, dll)
10. Teknologi untuk mengurai pencemaran udara dengan dust collector (alat penangkap debu), filter debu, dan mengubah teknologi proses produksi.
11. Teknologi untuk mengurangi dampak agroindustri dengan IPAL / UPLC (Unit Pengolahan Limbah Cair).

B. Upaya Tingkah Laku

Menurut Karyanto (2010) perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dipengaruhi oleh faktor penggerak. Faktor penggerak merupakan faktor kebutuhan yang mendorong munculnya perilaku pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan tertentu. Faktor penggerak dapat disebut juga sebagai alasan atau motivasi yang mendorong seseorang dalam mengelola lingkungan. Faktor penggerak tersebut terdiri dari dua bagian yaitu *capacity* dan *incentive*. *Capacity* dapat dilihat dari lima aspek yaitu modal finansial, sarana prasarana, modal alam, modal manusia dan modal sosial. Sedangkan *incentive* adalah penggerak eksternal yang telah terlembagakan dalam masyarakat. Upaya penguatan *capacity* yaitu (Karyanto, 2010):

1. Modal finansial didefinisikan sebagai kepemilikan secara akumulatif atas barang dan jasa melalui sistem keuangan berupa misalnya gaji, penghasilan, subsidi dan simpanan. Modal finansial merupakan salah satu determinan bagi perilaku pengelolaan lingkungan tertentu.
2. Modal sarana prasarana fisik. Contoh keseharian pengaruh sarana prasarana fisik terhadap perilaku misalnya perilaku memilah sampah berdasarkan bahan (sampah organik, dan non organik). Ketersediaan tempat sampah merupakan salah satu kunci bagi perilaku tersebut. Tidak tersedianya tempat sampah yang memisahkan sampah berdasarkan bahan tentu akan menjadi kendala bagi terciptanya perilaku membuang sampah secara memilah berdasarkan bahan.
3. Modal alam merupakan salah satu modal yang dapat mendorong perilaku lingkungan tertentu. Contohnya pada kasus petani kentang di tanah tinggi (upland), penggunaan pestisida dalam dosis yang berlebih merupakan keterpaksaan yang harus dilakukan oleh petani ketika wabah fusarium mengancam bersamaan dengan turunnya kabut embun.
4. Modal manusia merupakan set kapabilitas individual yang dimiliki oleh aktor pengelola lingkungan. Modal manusia merupakan modal yang sangat kompleks dan dinamis karena melibatkan manusia sebagai makhluk berotoritas yang berbudi dan

berintelengensi. Modal manusia dapat berupa keterampilan dan pengetahuan. Contohnya perilaku membuang sampah sembarangan mungkin bukan disebabkan karena kurangnya pengetahuan melainkan karena tindakan pribadi bahwa membuang sampah secara sembarangan adalah cara praktis yang dapat dilakukan. Peningkatan atas akses modal manusia dilakukan dengan peningkatan kapabilitas manusia sebagai aktor dan pembentukan *attitude* yang dimiliki melalui pendidikan.

5. Modal sosial didefinisikan sebagai struktur sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang kemudian dapat mengarahkan pada aktivitas kolektif tertentu. Modal sosial dapat menjamin aksesibilitas atas sumber daya dan kesempatan melalui ikatan sosial yang ada melalui koordinasi dan kerjasama. Secara umum dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kemampuan manusia sebagai individu dalam membangun jaringan dan koordinasi dalam struktur sosialnya, sehingga memunculkan karakteristik masyarakat dengan tipologi sosial yang khas.

Pada kondisi sosial tertentu *capacity* tidak cukup mendorong munculnya perilaku ramah lingkungan. Dalam kondisi tersebut *incentive* diperlukan sebagai pendorong. *Incentive* merupakan kekuatan yang membuat manusia berkemauan untuk patuh. *Incentive* yang dimaksud adalah bentuk regulasi formal oleh institusi dalam struktur sosialnya. Satu contoh *incentive* adalah kebijakan pemerintah tentang lingkungan yang mengatur mengenai AMDAL dan baku mutu (Karyanto, 2010).

- C. Upaya untuk memahami dan menerima koreksi alami yang terjadi karena dampak interaksi manusia dengan lingkungannya

Marzali et al (2002) menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sehingga mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan dengan memodifikasi lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar pengaruh merugikan dapat dihindarkan dan dilaksanakan pencegahan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan, sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian serta keindahan dapat terpelihara (Soerjani et al, 1987).

Manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Sejak awal perkembangan budayanya, manusia telah berusaha mengelola dampak yang dilakukannya terhadap lingkungan hidup. Semua kegiatan manusia memberikan dampak pada lingkungan hidup. Dampak tersebut semakin besar seiring pertambahan manusia,

kegiatan ekonomi, dan teknologi dalam merekayasa, serta penggunaan energi. Oleh karena itu manusia diupayakan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau merusak lingkungan (Matrizal, 2005).

2.4 Hubungan Pengelolaan Lingkungan dengan Kualitas Ruang Kampung

Menurut Mayasari & Ritohardoyo (2012), permasalahan perkotaan yang seringkali ditemui adalah masalah permukiman. Handayani (2009) menyebutkan bahwa permukiman kampung kota umumnya menampakkan kecenderungan yang sama yaitu semakin meluas dan tidak terkendali. Permukiman kampung kota ini menjadi masalah karena seringkali pertumbuhannya tidak mengindahkan aturan-aturan penggunaan lahan dan tidak mengindahkan aturan-aturan bangunan. Dalam kampung kota yang padat terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya. Salah satu penyebab masalah permukiman adalah akibat perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan lahan permukiman serta kebutuhan faktor sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan semakin tidak diperhatikannya lingkungan permukiman sehingga terjadi penurunan kualitas permukiman (Mayasari & Ritohardoyo, 2012). Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka diperlukan perencanaan pembangunan permukiman yang melibatkan masyarakat setempat yang menjadi kelompok sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat permukiman kampung kota (Handayani, 2009).

Kualitas permukiman memiliki makna erat kaitanya dengan kondisi dari suatu permukiman yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan penghuninya dalam memanfaatkan permukiman tersebut. Kualitas permukiman mencakup mengenai kondisi bangunan rumah, lingkungan rumah dan manusia yang ada didalamnya. Kualitas lingkungan permukiman adalah ketersediaan sarana dan prasarana permukiman baik secara kualitas maupun kuantitas (Mayasari & Ritohardoyo, 2012). Menurut Rahardjo (1989) lingkungan permukiman adalah suatu ruang yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim beserta halaman dan pekarangannya, jaring-jaring jalan, dan perangkat lain yang mendukung kelancaran hidup, sedangkan kualitas lingkungan permukiman adalah suatu keadaan khususnya permukiman dengan segala benda, keadaan dan makhluk hidup beserta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup di dalam permukiman tersebut.

Menurut Rooden (1983) dalam Rahmiati et al (2013) ruang terbuka publik merupakan fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Peran ruang terbuka publik sangat besar dalam meningkatkan

kualitas ruang kota karena kebersamaan dalam sosialisasi masyarakat diwadahi oleh ruang terbuka publik. Ruang terbuka merupakan ruang antar bangunan meliputi semua bentuk lanskap, *hardscape* (jalan dan jalur pejalan kaki), ruang hijau, kanal, kolam, menara air, taman dan area rekreasi di kawasan perkotaan. Ruang terbuka mengakomodasi aktivitas publik dan sangat erat dengan isu lingkungan karena fungsinya sebagai ruang lingkungan alami sebuah kota. Dalam konteks peningkatan kualitas ruang publik, hal yang terpenting dalam perancangan ruang terbuka adalah mendukung terjadinya interaksi sosial di dalamnya (Shirvani, 1985). Terjadinya ruang komunal di kampung juga tidak lepas dari pemahaman interaksi manusia dengan lingkungannya (Ihsan, 2014).

Darmawan (2007) menyebutkan dalam azas pemanfaatan ruang di Indonesia terdapat tiga unsur penting dalam penataan ruang kota yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berada dalam keseimbangan. Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya (Erfina, 2010). Ihsan (2014) juga menyebutkan bahwa manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh keselarasan dengan lingkungannya. Perilaku manusia merupakan pusat perhatian dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Perilaku manusia selalu mempengaruhi lingkungannya, karena itu manusia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan (Wardana, 1999). Aktivitas manusia dapat berdampak negatif maupun positif untuk lingkungan, namun aktivitas yang dilakukan oleh manusia memiliki kecenderungan untuk lebih meningkatkan permasalahan pencemaran seperti bertambahnya pembuangan hijau dari rumah tangga, bahan-bahan pembuangan industri rumah tangga, pencemaran udara oleh berbagai sumber, sampai pada permasalahan tercecernya detergen yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap maknan dan sistem air. Oleh karena itu aktivitas manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan.

Menurut Soerjani et al (1987) dalam setiap pengelolaan kegiatan manusia perlu mempertimbangkan keberadaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup manusia adalah sistem dimana berada perwujudan atau tempat dimana terdapat kepentingan

manusia di dalamnya. Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan alam, sosial dan lingkungan buatan mempunyai hubungan saling mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan hidup sosial yang menentukan seberapa jauh lingkungan hidup alam mengalami perubahan drastis menjadi lingkungan hidup buatan.

Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu upaya pengelolaan lingkungan adalah gerakan kampung hijau. Kampung hijau merupakan kampung yang melestarikan fungsi lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan kampung hijau perlu adanya partisipasi masyarakat (Puspita & Dewi, 2013). Partisipasi adalah peran serta, keterlibatan dan keikutsertaan yang terwujud di dalam sikap gotong-royong (Erfina, 2010). Partisipasi menuntut adanya keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dapat secara langsung dan tidak langsung. Keterlibatan secara langsung, misalnya ikut serta secara langsung dalam melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan keterlibatan secara tidak langsung misalnya memberikan bantuan material atau sumbangan pikiran dalam kegiatan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (sebagai salah satu dari berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman) telah terwujud melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Salam, 2010). Alit (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan dalam peningkatan kualitas permukiman mutlak diperlukan dan penerapannya dapat melibatkan berbagai komponen masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat, warga masyarakat desa maupun pemimpin desa dinas maupun adat. Pemberdayaan yang diharapkan adalah dalam berbagai wujud fisik maupun non fisik yang bersifat konstruktif, dan mensukseskan setiap program peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Aktivitas yang dilakukan dalam pemberdayaan adalah dalam berbagai segi dari pengungkapan insiatif, ide-ide, konsep, sampai realisasi ide tersebut.

Penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya. Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang

sehat (Prianto, 2011). Menurut Aprianto (2008) terdapat faktor-faktor yang berhubungan antara tingkat partisipasi warga kampung dengan pengelolaan lingkungan. Tingkat partisipasi warga tersebut lebih ditentukan oleh bagaimana warga berinteraksi dengan lingkungan, baik sosial maupun alam di sekitar tempat tinggal. Sehingga tingkat partisipasi warga yang tinggi perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pengelolaan lingkungan dapat berkelanjutan.

2.5 Tinjauan Analisis

A. *Multi Criteria Analysis* (MCA)

Analisis Multi Kriteria atau *Multi Criteria Analysis* (MCA) adalah perangkat pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk masalah-masalah kompleks multikriteria yang mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif dalam proses pengambilan keputusan. MCA mengevaluasi tingkat kepentingan relatif dari seluruh kriteria yang terkait dan menggambarkan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan akhir (Mendoza, 1991). MCA bertujuan untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan berbagai kriteria.

Pengambilan keputusan dalam Analisis Multi Kriteria dilakukan dengan menilai setiap alternatif menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga alternatif yang terpilih adalah alternatif dengan penilaian terbaik berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Tahapan pengambilan keputusan dalam MCA antara lain (Sulistyorini et al, 2010):

1. Indikasi jumlah alternatif lokasi yang akan dipilih.
2. Meninjau dominansi suatu pilihan terhadap pilihan lainnya.
3. Melakukan pembobotan.
4. Skoring kinerja tiap alternatif dengan memberikan penilaian terukur terhadap variabel kriteria secara kualitatif ataupun kuantitatif.
5. Mengalikan bobot setiap kriteria dengan skor kinerja alternatif.
6. Menjumlahkan nilai setiap kriteria sehingga didapat nilai total suatu alternatif.
7. Meranking nilai untuk mendapatkan prioritas alternatif.

Menurut Sulistyorini et al (2010) MCA memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan informal yang saat ini umum digunakan, yaitu:

1. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan.

2. Variabel dan kriteria analisis yang digunakan dapat lebih luas, baik kuantitatif maupun yang kualitatif.
3. Pemilihan variabel tujuan dan kriteria terbuka untuk dianalisis dan diubah jika dianggap tidak sesuai.
4. Nilai dan bobot ditentukan secara terbuka sesuai dengan persepsi pihak terkait yang dilibatkan (*stakeholders*).
5. Memberikan arti lebih terhadap proses komunikasi dalam pengambilan keputusan, diantara para penentu kebijakan, dan dalam hal tertentu dengan masyarakat luas.

Adapun konsep yang dikembangkan dalam analisis multi kriteria adalah sebagai berikut (Sulistiyorini, 2010):

1. Analisis sudah mempertimbangkan semua variabel sekomprensif mungkin dengan tetap menjaga proses ilmiah dari proses pengambilan keputusan.
2. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan kepentingan pihak-pihak yang harus diakomodasi.
3. Penetapan pilihan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah tujuan dengan mengembangkan sejumlah kriteria yang terukur.
4. Skoring adalah preferensi alternatif terhadap kriteria tertentu.
5. Pembobotan adalah penilaian relatif antar kriteria.

B. Metode Perbandingan Pasangan

Perbandingan pasangan adalah metode dalam menyaring kriteria yang kompleks untuk pemecahan masalah menjadi satu seri penilaian satu banding satu mengenai kepentingan relatif tiap kriteria (Mendoza, 1991). Setiap kriteria akan dipasangkan dan dibandingkan untuk mengetahui kriteria mana yang lebih penting. Tahapan dalam pembobotan dengan metode perbandingan pasangan yaitu (Mendoza, 1991):

1. Tahap awal dalam pembobotan kriteria adalah penentuan kriteria yang lebih penting. Penentuan kriteria tersebut dilakukan oleh beberapa ahli. Terdapat skala nilai penting antar kriteria dengan menggunakan skala 1-9. Penetapan nilai penting tersebut dijelaskan pada **Tabel 2.1** (Saaty,1980).

Tabel 2.1 Skala Perbandingan Pasangan

ni	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbangannya sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya

ni	Definisi	Penjelasan
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong, dan dominannya telah terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber: Saaty (1980)

2. Setelah menentukan nilai penting paramater pasangan maka langkah selanjutnya adalah mentransformasikan ke dalam bentuk matriks perbandingan pasangan.
3. Menghitung bobot kriteria. Langkah perhitungan bobot kriteria yaitu:
 - a. Menjumlah nilai untuk setiap kolom pada matriks perbandingan kriteria
 - b. Membuat matriks perbandingan pasangan ternormalisasi dengan membagi nilai setiap sel dengan nilai total pada kolom yang bersangkutan.
 - c. Menghitung nilai rata di setiap baris matriks ternormalisasi.
4. Estimasi rasio konsistensi

Estimasi rasio konsistensi dilakukan untuk menentukan apakah perbandingan pasangan yang dilakukan pada tahap sebelumnya konsisten atau tidak. Dari perhitungan rasio konsistensi diketahui bahwa proses perbandingan konsisten atau tidak sehingga akan didapatkan nilai bobot untuk masing-masing kriteria.

C. Korelasi

Salah satu teknik statistik yang digunakan dalam analisis hubungan adalah analisis korelasi. Korelasi merupakan salah satu statistik inferensi yang akan menguji dua variabel atau lebih mempunyai hubungan atau tidak (Thoifa, 2015). Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Korelasi dalam SPSS terdiri dari tiga metode korelasi sederhana (*bivariate correlation*) diantaranya *Pearson Correlation*, *Kendall's tau-b*, dan *Spearman Correlation*. *Pearson Correlation* digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan *Kendall's tau-b*, dan *Spearman Correlation* digunakan untuk data berskala ordinal. Terdapat tiga penggolongan berdasarkan jenis data dalam uji korelasi yaitu:

1. Data nominal

Jika data semua variabel merupakan data nominal maka digunakan uji koefisien kontingensi. Contoh jenis data nominal antara lain jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lainnya.

2. Data ordinal

Jika data semua variabel merupakan data ordinal atau satu variabel lainnya data rasio maka digunakan uji Kendall dan dapat juga menggunakan uji Spearman. Contoh jenis data ordinal adalah pendapat tentang kepuasan pelanggan.

3. Data rasio dan interval

Jika data semua variabel merupakan data rasio dan data interval maka digunakan uji *product moment Pearson*. Contoh jenis data rasio adalah pendapatan.

Menurut Sarwono (2009) interpretasi hasil analisis korelasi terdiri dari tiga penafsiran yaitu melihat kekuatan hubungan dua variabel, melihat signifikansi hubungan, dan melihat arah hubungan. Kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu pengukuran statistik kovariansi atau asosiasi antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Jika dua variabel tidak berhubungan maka korelasinya 0 (nol). Nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Jika dua variabel memiliki korelasi sempurna maka korelasinya 1 (Thoifa, 2015). Hubungan variabel yang tidak mempunyai hubungan yang tinggi selanjutnya dieliminasi dari perhatian. Keeratan hubungan antar variabel ditentukan sebagai berikut:

- a. Koefisien korelasi = 0 maka tidak ada korelasi.
- b. $0 < \text{koefisien korelasi} \leq 0,20$ maka korelasi sangat rendah atau lemah sekali.
- c. $0,20 < \text{koefisien korelasi} \leq 0,40$ maka korelasi rendah atau lemah tapi pasti.
- d. $0,40 < \text{koefisien korelasi} \leq 0,60$ maka korelasi cukup berarti.
- e. $0,60 < \text{koefisien korelasi} \leq 0,80$ maka korelasi yang tinggi atau kuat.
- f. $0,80 < \text{koefisien korelasi} \leq 1,00$ maka korelasi sangat tinggi, kuat sekali dan dapat diandalkan.
- g. Koefisien korelasi = 1 maka korelasi sempurna.

Interpretasi kedua adalah melihat signifikansi hubungan dua variabel dengan didasarkan pada angka signifikansi. Interpretasi ini membuktikan apakah hubungan kedua variabel signifikan atau tidak. Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau tidak (dapat digeneralisasi). Signifikansi / probabilitas / α memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil riset. Pengambilan keputusan statistik dalam uji signifikansi dalam SPSS dilakukan dengan melihat angka signifikansi (Sarwono, 2009) yaitu:

- a. Apabila nilai Sig. < angka signifikansi maka ada korelasi yang signifikan (Ho ditolak)
- b. Apabila nilai Sig. > angka signifikansi maka tidak ada korelasi yang signifikan (Ho diterima)

Menurut Sarwono (2009) angka signifikansi umumnya digunakan sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. Angka signifikansi sebesar 0,01 mempunyai pengertian bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian adalah sebesar 99%. Jika angka signifikansi sebesar 0,05, maka tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian adalah sebesar 95%. Jika angka signifikansi sebesar 0,1 maka tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian adalah sebesar 90%.

Pertimbangan penggunaan angka signifikansi didasarkan pada dua pertimbangan yaitu (Sarwono, 2009):

1. Tingkat kepercayaan (*confidence interval*) yang diinginkan oleh peneliti.
2. Jumlah data sample yang akan digunakan dalam penelitian

Semakin kecil angka signifikansi, maka ukuran sample akan semakin besar. Semakin besar angka signifikansi, maka ukuran sample akan semakin kecil.

Interpretasi ketiga adalah melihat arah korelasi. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (*two tailed*), yaitu searah dan tidak searah. Arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi ditemukan +1 maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (*slope*) positif. Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan kedua variabel searah. Searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Jika koefisien korelasi ditemukan -1 maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna dengan kemiringan (*slope*) negatif. Koefisien korelasi negatif menunjukkan hubungan kedua variabel tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y akan rendah (Sarwono, 2009).

2.6 Tinjauan Studi Terdahulu

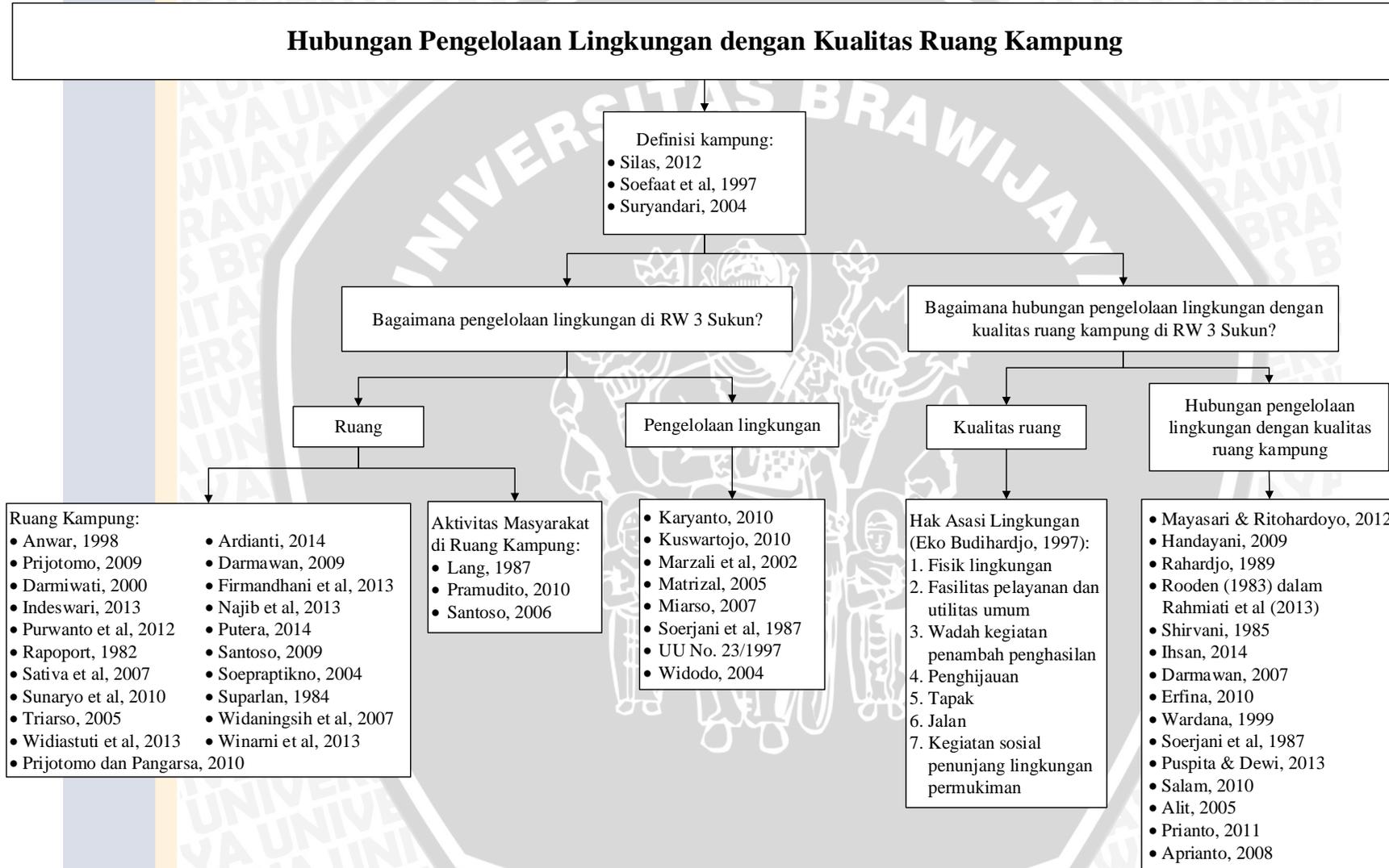
Tinjauan studi terdahulu merupakan perbandingan studi yang serupa sebagai acuan terkait penelitian maupun sebagai referensi. Berikut merupakan studi terdahulu yang dijelaskan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2. 2 Studi Terdahulu

No	Nama, Tahun, Publikasi	Judul	Masalah	Variabel	Teknik analisa yang digunakan	Hasil
1	Astrini Ayu Puspita, 2014, Universitas Diponegoro	Analisis Upaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Kampung Hijau (Studi Kasus : Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapatnya permasalahan dalam kampung yang menunjukkan belum optimalnya upaya dalam mewujudkan kampung hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik pemanfaatan ruang Karakteristik perilaku ramah lingkungan Karakteristik keterlibatan masyarakat Karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat 	Metode analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan skoring dan pembobotan.	Tingkat keberhasilan upaya mewujudkan kampung hijau
2	Kartika Mega Puspita, 2013, Universitas Diponegoro	Analisis Peran Gerakan Kampung Hijau Sebagai Upaya Pengelolaan di Kelurahan Rajawati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan kampung hijau di Kelurahan Rajawati belum dapat meningkatkan kondisi lingkungan karena kondisi lingkungan yang masih terlihat kumuh. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan kampung hijau Upaya pengelolaan lingkungan 	Metode analisis kuantitatif deskriptif yang digunakan dalam identifikasi karakteristik masyarakat, identifikasi karakteristik kondisi fisik lingkungan, dan analisis program gerakan kampung hijau	Tahapan peranan dari gerakan kampung hijau sebagai upaya pengelolaan lingkungan
3	Mustika Tarra, 2010, Universitas Brawijaya	Pemanfaatan Ruang Komunal Masyarakat Perkotaan pada Permukiman Kampung Kapasri Pedukuh	<ul style="list-style-type: none"> Penataan permukiman kota yang kurang baik menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan ketidaknyamanan bagi manusia Pemanfaatan lingkungan fisik kampung belum terbina dan tertata dengan baik terutama pada area ruang komunal Penataan ruang komunal kampung belum memperhatikan tinjauan perilaku masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku Aktivitas Kondisi fisik ruang komunal 	Penelitian kualitatif dengan metode etnografis terkait kondisi fisik ruang komunal kampung, perilaku pada ruang komunal, dan pemanfaatan ruang komunal	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik tipe ruang komunal Perbedaan pemanfaatan ruang komunal berdasarkan gender dan pola aktivitas berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi.

No	Nama, Tahun, Publikasi	Judul	Masalah	Variabel	Teknik analisa yang digunakan	Hasil
4	Raisya Nursyahbani, 2015, Universitas Diponegoro	Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim menyebabkan pembangunan rumah tipe moderen dan tempat-tempat untuk usaha oleh masyarakat sendiri terus bertambah. Pembangunan yang tidak disertai dengan pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan lingkungan kampung tersebut kumuh, tidak teratur, tidak nyaman dan tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik penghuni • Karakteristik hunian • Karakteristik sarana prasarana • Karakteristik lingkungan • Tingkat kekumuhan 	Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan skoring.	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik kampung • Tipologi kampung berdasarkan ingkat kekumuhan
5	Ach. Rahman Dwi, 2013, Universitas Brawijaya	Hubungan Arus Pejalan Kaki dengan Kualitas Fasade Bangunan Berdasarkan Konsep Active Frontage Jalan Kawi Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Mall Olympic Garden memiliki intensitas pengunjung yang sangat tinggi namun jarak bangunan jauh dari trotoar serta kurang mendukung interaksi pejalan kaki • Kondisi tampilan bangunan kurang menarik pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejalan kaki • Kualitas fasade bangunan • Konsep active frontage 	Metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan uji korelasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas fasade bangunan • Hubungan arus pejalan kaki dengan kualitas fasade bangunan koridor perdagangan dan jasa

2.7 Kerangka Teori



Gambar 2. 2 Kerangka Teori